

Pengaruh Kompetensi Aparatur, penerapan akuntabilitas dan Ketaatan pada peraturan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada BPKA Provinsi Aceh

Eliana¹, Thasrif Murhadi², Indra Kesuma¹, Irmawati², Engkin Muttaqin¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia

Alamat: Gp, Jl. Prada Utama No.15, Pineung, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23116

Korespondensi penulis: elianajl843@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyse the competence of local government apparatus, the implementation of financial accountability and compliance with regulations on performance accountability at the Aceh Financial Management Agency. The sample of this study were employees of the Aceh Financial Management Agency, totalling 29 employees using the census technique. The variable competence of local government apparatus, the application of financial accountability and adherence to regulations on performance accountability is measured using a Likert scale, and the data is obtained by distributing questionnaires to respondents. The results of the analysis show that simultaneously there is an influence of the competence of local government apparatus, the application of financial accountability and adherence to regulations on performance accountability. The results of the F test obtained $F_{count} > F_{tabel}$ or $(16.346 > 2.73)$ and a significant test that the p value is $0.000 < p$ which is set at 0.05. Partial test results show that: 1. The competence of local government apparatus affects performance accountability $T_{hitung} 3,755 > T_{tabel} 1,703$ and p value $0.001 < p 0.05$ means significant. 2. The application of financial accountability affects performance accountability $T_{hitung} 2,713 > T_{tabel} 1,703$ and p value $0.002 < p 0.05$ means significant, 3. Obedience to regulations affects performance accountability $T_{hitung} 2,777 > T_{tabel} 1,703$ and p value $0.004 < p 0.05$ means significant.*

Keywords: *Performance Accountability, Apparatus Competence, Accountability Implementation, Adherence to Regulations*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Sampel dari penelitian ini adalah pegawai yang ada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang berjumlah 29 orang pegawai dengan menggunakan tehnik sensus. Variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja diukur dengan menggunakan skala Likert, dan data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ke responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil uji F diperoleh angka $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $(16,346 > 2,73)$ dan uji signifikan bahwa p value sebesar $0,000 < p$ yang ditetapkan sebesar 0,05. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa : 1. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja $T_{hitung} 3,755 > T_{tabel} 1,703$ dan p value $0,001 < p 0,05$ berarti signifikan. 2. Penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja $T_{hitung} 2,713 > T_{tabel} 1,703$ dan p value $0,002 < p 0,05$ berarti signifikan, 3. Ketaatan pada peraturan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja $T_{hitung} 2,777 > T_{tabel} 1,703$ dan p value $0,004 < p 0,05$ berarti signifikan.

Kata kunci: Akuntabilitas Kinerja, Kompetensi Aparatur, Penerapan Akuntabilitas, Ketaatan Pada Peraturan

1. LATAR BELAKANG

Dalam pedoman penyusunan penetapan kinerja daerah, instansi pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar penggunaan APBD dan APBN menjadi efisien dan efektif maka dalam pengelolaannya diperlukan akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah, (Peraturan Menteri Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja).

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juni 23, 2024; Accepted: Juli 14, 2024; Published: Juli 17, 2024;

* Eliana, elianajl843@gmail.com

Berdasarkan PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Menurut Sofyani dan Akbar (2013) bahwa keberhasilan suatu organisasi bergantung pada kompetensi aparatur yang berada dalam organisasi tersebut. Kompetensi merupakan kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan (Putri dkk., 2015). Aparatur pemerintah merupakan penyangga utama instansi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan instansi.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik (Putri, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara (Razi, 2017).

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik Aceh, perbendaharaan, akuntansi dan pembinaan serta evaluasi anggaran kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang dilakukan oleh Kementrian PANRB, yang memperoleh nilai SAKIP BPKA berada pada posisi BB (baik sekali) dengan nilai 77,00, yang dapat diinterpretasikan terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Penulis ingin menguji pengaruh kompetensi apartur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Dimana ada banyak penanganan berbagai masalah yang diting

karena kinerja yang masih kurang atau yang masih belum memadai pada saat mereka harus membuat akuntabilitas yang baik dalam pemerintah. Kondisi ini lah yang menunjukkan kurang adanya kesadaran bagi aparatur pemerintah bahwa sistem informasi adalah aspek penting yang harus diterapkan dalam setiap instansi pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi masalah penelitian adalah apakah kompetensi aparatur, penerapan akuntabilitas dan ketaatan pada peraturan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja pada BPKA Provinsi Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui kompetensi aparatur, penerapan akuntabilitas dan ketaatan pada peraturan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja pada BPKA Provinsi Aceh.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban pemerintah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat (*principal*) (Mahsun, 2011:169). Menurut Mahmudi (2013:19) menjelaskan bahwa terdapat 5 komponen indikator akuntabilitas kinerja: 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran, 2) Akuntabilitas Manajerial, 3) Akuntabilitas program, 4) Akuntabilitas Kebijakan, 5) Akuntabilitas Finansial.

Kompetensi Aparatur

Menurut Wibowo (2014:320) kompetensi aparatur adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. terdapat tiga indikator kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, Wibowo (2014:322).

Penerapan Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013:19) akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Di mana akuntabilitas keuangan menurut Sudaryo, dkk. (2017:48)

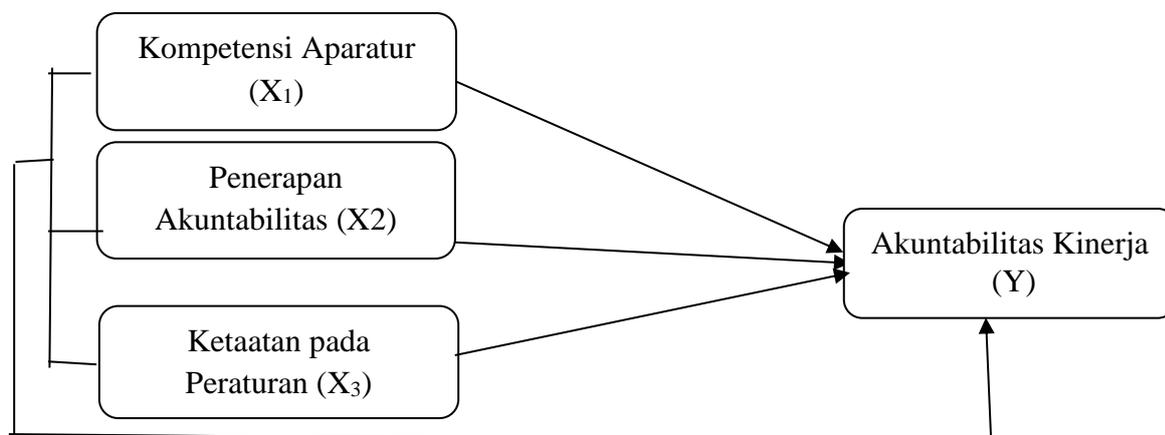
dapat diukur melalui beberapa indikator: 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, 2) Akuntabilitas Proses, 3) Akuntabilitas Program, 4) Akuntabilitas kebijakan.

Ketaatan Pada Peraturan

Menurut Razi (2017) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu suatu sifat patuh dan taat terhadap peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Menurut Pujirahayu, dkk. (2020:126) adapun indikator kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 di antaranya: 1) *Compliance*, 2) *Identification*, 3) *Internalization*.

Kerangka Koseptual

Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2018:48) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan. paradigma penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang dijelaskan berikut ini.



Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:221), hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan belum terbukti. Artinya dugaan masih bersifat tentatif. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang dijadikan hipotesis bagi penelitian.

H₁: Kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan secara simultan berpengaruh akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

H₂: Kompetensi aparatur pemerintah daerah secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

H₃: Penerapan akuntabilitas keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Ha₄: Ketaatan pada peraturan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018:119) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini ini adalah Kepala Dinas, sekretaris, analis keuangan, kabid dan kasubbag di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang keseluruhan berjumlah 29 responden. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (sampel sensus). sampel menurut Sugiyono (2018:73) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representative* (mewakili). Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sugiyono (2018:17) menjelaskan metode pengumpulan data terdiri dari metode angket (*questionnaire*) dan wawancara.

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung, data ini diperoleh melalui kegiatan observasi yaitu pengamatan langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menjadi objek penelitian dan mengadakan wawancara dengan pegawai serta penyebaran kuesioner kepada responden di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Skala pengukuran digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut Sugiyono (2018:86) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang/sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Metode analisis dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, Jabatan dan lama bekerja.

Tabel 1 Karakteristik Responden

| No | Strata | Frekuensi | Presentase |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Jenis kelamin | | |
| | a. Laki-Laki | 19 | 65,5 |
| | b. Perempuan | 10 | 34,5 |
| 2 | Usia | | |
| | a. 20 - 29 tahun | 0 | 0 |
| | b. 30-39 Tahun | 10 | 34,5 |
| | c. 40-49 Tahun | 14 | 48,3 |
| | d. Diatas 50 Tahun | 5 | 17,2 |
| 3 | Pendidikan Terakhir | | |
| | a. SMA | 0 | 0 |
| | b. Diploma(D3) | 0 | 0 |
| | c. Sarjana (S1) | 7 | 24,1 |
| | d. Pasca Sarjana(S2) | 22 | 75,9 |
| | e. Doktor (S3) | 0 | 0 |
| 4 | Jabatan | | |
| | a. Kepala Dinas dan Sekretaris | 2 | 6,9 |
| | b. Kepala Bidang | 6 | 20,7 |
| | c. Kepala Subbagian | 13 | 44,8 |
| | d. Analis | 8 | 27,6 |
| 5 | Lama Bekerja | | |
| | a. 1 - 3 tahun | 0 | 0 |
| | b. 4 - 6 tahun | 0 | 0 |
| | c. 7 - 9 tahun | 5 | 17,2 |
| | d. Diatas 9 tahun | 24 | 82,8 |
| Total | | 29 | 100 |

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki sebagai proporsi yang lebih besar dibanding pegawai perempuan yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Dilihat dari usia responden saat ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata usia 40 sampai dengan 49 tahun yang mendominasi pegawai di BPKA, yang berjumlah 48,3% atau sebanyak 14 pegawai. Latar pendidikan terakhir responden dapat dijelaskan bahwa kebanyakan pegawai sudah Magister (S-2) yang berjumlah 22 orang pegawai atau 75,9%. jabatan sekarang ini yang paling banyak adalah kepala Subbidang sebagai proporsi yang paling banyak yaitu sebesar 44,8% atau 13 orang pegawai di BPKA. Lama bekerja menunjukkan bahwa 24 pegawai atau 82,8 % sudah mengabdikan dirinya di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh lebih 9 tahun.

2. Uji Validitas

Untuk item pernyataan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja (Y) diperoleh nilai korelasi antara skor alternatif pilihan jawaban responden terhadap item

pernyataan pertama (dilambangkan dengan AK_1) dengan total skor semua pernyataan dalam variabel tersebut sebesar 0,923. Sedangkan nilai korelasi tabel dengan $n = 29$ menunjukkan angka sebesar 0,369 dengan demikian dapat diartikan bahwa data yang bersangkutan dinyatakan valid. Begitu juga halnya dengan item pernyataan lain yang terdapat dalam variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah (X1), variabel penerapan akuntabilitas keuangan (X2) dan variabel ketaatan pada peraturan (X3).

3. Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah suatu hasil yang menunjukkan hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Hasil pengolahan data memperlihatkan nilai koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60, yang artinya variabel dependen dan variabel independen menunjukkan hasil yang reliabel.

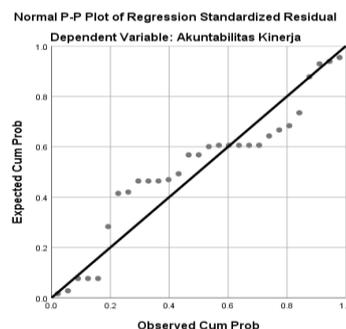
Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | Jumlah Item | Cronbach Alpha | Kesimpulan |
|----|--|-------------|----------------|------------|
| 1 | Akuntabilitas Kinerja (Y) | 5 | 0,922 | Handal |
| 2 | Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X1) | 5 | 0,914 | Handal |
| 3 | Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X2) | 5 | 0,864 | Handal |
| 4 | Ketaatan pada Peraturan (X4) | 4 | 0,807 | Handal |

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk menguji distribusi data normal atau tidak. Normalitas data juga dapat dilihat dengan menggunakan *normal probability plot* dan metode analisis grafik.



Gambar 1 Normal Probability Plot

Data yang berdistribusi normal pada grafik titik-titik penyebaran terlihat ada disekitar garis diagonal. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal

b. Uji Multikolinieritas

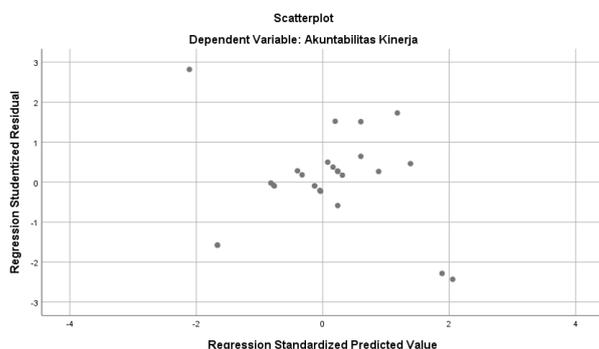
Tabel 3 Pengujian Multikolinieritas

| Variabel Independen | Tolerance | Nilai VIF |
|--|-----------|-----------|
| Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X1) | 0,323 | 3,092 |
| Penerapan akuntabilitas Keuangan (X2) | 0,292 | 3,430 |
| Ketaatan pada Peraturan (X3) | 0,487 | 2,052 |

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Hal ini dikarenakan hasil pengujian untuk variabel independen menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10

c. Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas melalui uji *Scatterplot* seperti terlihat pada Gambar 2.



Menyimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hal ini terlihat bahwa titik-titik dalam *scatterplot*nya menyebar secara acak dengan pola menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Simultan

Pengujian secara simultan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel kompetensi aparatur, penerapan akuntabilitas dan ketaatan pada peraturan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, hasil uji F hitung dapat dilihat pada table 4.

**Tabel 4 hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 69.020 | 3 | 23.007 | 16.346 | .000 ^b |
| | Residual | 35.187 | 25 | 1.407 | | |
| | Total | 104.207 | 28 | | | |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

b. Predictors: (Constant), Ketaatan pada Peraturan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Tabel 4 hasil pengujian nilai F_{hitung} 16,346 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai probabilitasnya (0,000) lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan variabel kompetensi aparatur, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan secara simultan berpengaruh akuntabilitas kinerja dapat diterima.

b. Uji Secara Parsial (Uji t)

pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t (*t-test*). Variabel independen dikatakan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen apabila memiliki nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen dibawah 0,05. Hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada table 5.

Tabel 5 Hasil Uji T (Parsial)
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 7.735 | 1.988 | | 3.892 | .001 |
| | Kompetensi Aparatur | .558 | .149 | .767 | 3.755 | .001 |
| | Penerapan Akuntabilitas | .132 | .185 | .154 | 2.713 | .002 |
| | Ketaatan pada Peraturan | .116 | .150 | .129 | 2.777 | .004 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan output SPSS pada Tabel 5, dapat dituliskan dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = 7,735 + 0,558X_1 + 0,132X_2 + 0,116X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = 7,735 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel akuntabilitas kinerja (Y) sama dengan 7,735.

2. Koefisien $X1(b1) = 0,558$, menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur ($X1$) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Artinya jika kompetensi aparatur ditingkatkan maka akuntabilitas kinerja juga akan meningkat sebesar 0,558 (55,8%).
 3. Koefisien $X2(b2) = 0,132$, menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntabilitas ($X2$) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Artinya jika penerapan akuntabilitas keuangan ditingkatkan maka akuntabilitas kinerja juga akan meningkat sebesar 0,132 (13,2%).
 4. Koefisien $X3(b3) = 0,116$, menunjukkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan ($X1$) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Artinya jika ketaatan pada peraturan ditingkatkan maka akuntabilitas kinerja juga akan meningkat sebesar 0,116 (11,6%)
 5. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu
6. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R square*. Table 6 menunjukan nilai dari *R square*

Tabel 6 Nilai Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .814 ^a | .662 | .622 | 1.186 |

a. Predictors: (Constant), Ketaatan pada Peraturan, Kompetensi Aparatur, Penerapan Akuntabilitas

Berdasarkan table 6 hasil analisis data diperoleh nilai *R square* sebesar 0,662 yang artinya variabel akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan oleh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan sebesar 66,2% sedangkan 33,8% pengaruhnya dijelaskan oleh variabel lainnya.

7. Pembahasan

a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntansi Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Pada tabel 5 tersebut nilai koefisien $X1 = 0,558$, menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur memiliki hubungan yang positif terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Semakin tinggi kompetensi yang di digambarkan

dengan pengalaman dan tingkat pendidikan yang tinggi akan menunjang hasil kinerja yang berkualitas. Hal ini berarti bahwa Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dapat dicapai jika pegawai memiliki kompetensi yang baik. Pegawai sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya.

b. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Akuntansi Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Pada tabel 5 nilai koefisien $X_2 = 0.132$, menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntabilitas memiliki hubungan yang positif terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Semakin baik penerapan akuntabilitas keuangan akan mempengaruhi semakin efektifnya kinerja instansi pemerintah daerah yang dihasilkan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

c. Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Terhadap Akuntansi Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Pada tabel tersebut nilai koefisien $X_3 = 0.116$, menunjukkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan memiliki hubungan yang positif terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Karena semakin tinggi ketaatan pada peraturan perundangan pegawai untuk dapat bekerja lebih baik di instansi akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah yang akan dihasilkan. Secara hierarki di Indonesia, peraturan-peraturan perundangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang, keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Saran

Pada penelitian selanjutnya, diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada satu SKPD Kabupaten/Kota, namun dapat menambahkan SKPD dari Kabuapten/Kota lainnya dari Provinsi sehingga lebih dapat digeneralisasikan. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menambah variabel yang memiliki hubungan yang cukup erat untuk berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Direkomendasikan untuk menambah variabel penerapan anggaran berbasis kinerja untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Mahmudi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Pujirahayu, Esmi Warassih, Derita Prapti Rahayu, dan Faisal. (2020). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera.
- Putri, Egrinaen Mauliziska Nugraheni. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). (Empirical Study On The Regional Work Units Pekanbaru). *JOM (Jurnal Online Mahasiswa)*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2 (1). Pekanbaru.
- Razi, Riska Fahrul (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekom Vol. 4 No. 1*. Pekanbaru.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Sektor Publik*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Sofyani, H., dan Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10 (2), 184-205.
- Sofyani, H., dan Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19 (2), 153-173.
- Sudaryo, Yoyo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti. (2017). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. PT. Alfabeta.

Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja, (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Rajawali Pers

Wibowo. (2014). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.